



Eksplorasi Dampak Kebijakan Moneter Terhadap Kesejahteraan di Wilayah Pedesaan

Yoni Saputri Damanik¹, Feby Injilia Nadeak², Gresya Adelina Purba³,
Rifqah Harahap⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional Bisnis Menejeman Indonesia Medan
Corresponding E-mail: yonidamanik79@gmail.com*

Article Info

Article history:

Received July 09, 2025

Revised July 18, 2025

Accepted July 23, 2025

Keywords:

Monetary Policy, Rural Welfare, Local Economy, Phenomenology, Survival Strategies.

ABSTRACT

This study aims to gain an in-depth understanding of the impact of monetary policy on the welfare of rural communities using a qualitative approach and phenomenological methods. The research focuses on exploring perceptions, real experiences, and forms of adaptation undertaken by communities in response to macroeconomic dynamics, particularly those related to inflation rates, interest rate fluctuations, and limited access to financing. Data was collected through in-depth interviews with 12 informants, including farmers, micro-entrepreneurs, housewives, and community leaders in villages economically dependent on the agricultural sector and small businesses. Findings indicate that while technical understanding of monetary policy is relatively limited, communities directly feel its impact through rising prices of basic necessities, difficulties in obtaining productive credit, and increased household economic uncertainty. Adaptation strategies include reducing consumption, seeking additional sources of income, and strengthening social solidarity within the community. These results underscore the need for monetary policies that are designed in a more participatory and contextual manner, as well as the importance of strengthening economic literacy in rural areas to enhance community resilience against macroeconomic pressures.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received July 09, 2025

Revised July 18, 2025

Accepted July 23, 2025

Keywords:

Kebijakan Moneter, Kesejahteraan Perdesaan, Ekonomi Lokal, Fenomenologi, Strategi Bertahan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam pengaruh kebijakan moneter terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan pedesaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode fenomenologis. Fokus penelitian diarahkan pada penelusuran persepsi, pengalaman nyata, serta bentuk-bentuk adaptasi yang dilakukan masyarakat dalam menghadapi dinamika ekonomi makro, khususnya yang berkaitan dengan laju inflasi, fluktuasi suku bunga, dan keterbatasan akses pembiayaan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap 12 informan, yang terdiri dari petani, pelaku usaha mikro, ibu rumah tangga, serta tokoh masyarakat di desa yang secara ekonomi bergantung pada sektor pertanian dan usaha kecil. Temuan menunjukkan bahwa meskipun pemahaman teknis terhadap kebijakan moneter relatif terbatas, masyarakat merasakan dampaknya secara langsung melalui naiknya harga kebutuhan pokok, sulitnya memperoleh kredit produktif, serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi rumah tangga. Strategi adaptasi yang muncul meliputi pengurangan konsumsi, pencarian sumber penghasilan tambahan, dan penguatan solidaritas sosial dalam komunitas. Hasil ini menegaskan perlunya kebijakan moneter yang dirancang secara lebih partisipatif dan kontekstual, serta pentingnya penguatan literasi ekonomi di wilayah pedesaan untuk meningkatkan daya tahan masyarakat terhadap tekanan



ekonomi makro.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Yoni Saputri Damanik

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional Bisnis Menejeman Indonesia Medan

E-mail: yonidamanik79@gmail.com

Pendahuluan

Kebijakan moneter merupakan salah satu alat penting yang digunakan pemerintah dalam mengelola stabilitas perekonomian nasional. Melalui pengaturan suku bunga, pengendalian jumlah uang beredar, dan manajemen likuiditas, kebijakan ini dirancang untuk menjaga kestabilan harga, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengendalikan laju inflasi. Meski demikian, dalam pelaksanaannya, efek dari kebijakan ini sering kali tidak dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok masyarakat, terutama masyarakat di kawasan perdesaan yang memiliki struktur sosial dan ekonomi yang berbeda dari daerah perkotaan.

Kawasan perdesaan biasanya bergantung pada sektor-sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan usaha mikro kecil, yang rentan terhadap perubahan harga dan terbatasnya akses terhadap sumber pembiayaan. Perubahan dalam suku bunga maupun tekanan inflasi dapat menyebabkan masyarakat perdesaan kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, mengalami penurunan daya beli, serta menghadapi hambatan dalam memperoleh kredit usaha. Situasi ini memunculkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana kebijakan moneter berpengaruh secara nyata terhadap taraf hidup dan kesejahteraan mereka.

Sebagian besar penelitian dalam ekonomi makro selama ini lebih menitikberatkan pada analisis kuantitatif yang mengacu pada indikator makroekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), tingkat pengangguran, atau indeks harga konsumen (IHK). Sayangnya, sudut pandang masyarakat lapisan bawah, khususnya yang tinggal di pedesaan, belum banyak dikaji secara mendalam. Padahal, memahami bagaimana mereka memaknai, merasakan, dan merespons kebijakan ekonomi makro sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengalaman serta pandangan masyarakat perdesaan yaitu di desa bandar maria kabupaten simalungun terhadap dampak kebijakan moneter yang dijalankan oleh pemerintah. Dengan pendekatan kualitatif dan metode fenomenologis melalui wawancara mendalam, studi ini diharapkan dapat menyajikan perspektif yang lebih kaya dan kontekstual tentang keterkaitan antara kebijakan moneter dan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

Landasan Teori

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen ekonomi yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengatur stabilitas perekonomian melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan penyesuaian tingkat suku bunga. Menurut Nopirin (2016), kebijakan ini memiliki tujuan utama untuk menjaga kestabilan harga, mendorong penciptaan lapangan kerja yang optimal, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Alat utama yang digunakan dalam kebijakan moneter



mencakup pengaturan suku bunga, pelaksanaan operasi pasar terbuka, serta penetapan cadangan minimum perbankan.

Di Indonesia, kebijakan ini berada di bawah kewenangan Bank Indonesia yang memiliki fokus utama pada pengendalian inflasi. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sering kali tidak merata, terutama dalam menjangkau masyarakat di daerah pedesaan. Sebagian besar masyarakat desa menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan sektor informal lainnya, yang cenderung kurang terjangkau oleh sistem keuangan formal, sehingga sulit merasakan secara langsung manfaat dari kebijakan moneter yang diterapkan (Sukirno, 2017).

2. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merujuk pada kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar individu atau kelompok, termasuk kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, dan rasa aman. Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa kesejahteraan bukan hanya berkaitan dengan aspek pendapatan, tetapi juga mencerminkan kualitas hidup secara menyeluruh. Dalam konteks masyarakat pedesaan, kesejahteraan erat kaitannya dengan kestabilan harga barang kebutuhan pokok, akses terhadap pelayanan publik, serta peluang untuk meningkatkan pendapatan melalui kegiatan ekonomi lokal.

Variabel-variabel makroekonomi seperti inflasi, fluktuasi tingkat suku bunga, dan daya beli masyarakat memberikan pengaruh besar terhadap kesejahteraan, khususnya bagi kelompok rentan di wilayah pedesaan. Ketika kebijakan moneter tidak selaras dengan intervensi mikro ekonomi yang mendukung sektor produktif lokal, hal ini dapat memperdalam ketimpangan ekonomi dan memperlebar kesenjangan antarwilayah.

3. Teori Transmisi Kebijakan Moneter

Teori transmisi kebijakan moneter menggambarkan bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi perekonomian secara luas, melalui sejumlah saluran yang menghubungkan keputusan bank sentral dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Mishkin (2007) mengidentifikasi beberapa saluran utama dalam transmisi tersebut, yaitu:

- a) **Saluran suku bunga:** Perubahan suku bunga acuan memengaruhi biaya meminjam dan menabung, yang selanjutnya berdampak pada pola konsumsi dan investasi masyarakat.
- b) **Saluran kredit:** Likuiditas perbankan yang dipengaruhi kebijakan moneter mempengaruhi kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengakses kredit.
- c) **Saluran nilai tukar:** Kebijakan moneter juga berdampak pada nilai tukar mata uang, yang selanjutnya memengaruhi harga barang impor dan ekspor.

Di daerah pedesaan, efektivitas saluran-saluran ini sering kali terhambat oleh berbagai kendala struktural, seperti keterbatasan akses ke layanan keuangan formal, rendahnya literasi ekonomi, serta tingginya ketergantungan pada sektor informal. Kondisi ini menjadikan masyarakat desa lebih rentan terhadap dampak negatif dari kebijakan moneter dibandingkan mereka yang berada di wilayah perkotaan.

4. Ketimpangan Wilayah dan Kerentanan Ekonomi Pedesaan

Dalam perspektif pembangunan wilayah, perbedaan respons dan daya adaptasi antar wilayah terhadap kebijakan nasional menjadi isu penting. Teori pusat dan pinggiran (core-periphery theory) yang dikemukakan oleh Friedmann (1966) menjelaskan bahwa wilayah pinggiran seperti pedesaan cenderung menjadi penerima dampak dari kebijakan yang dipusatkan dan dirancang tanpa memperhatikan kondisi lokal. Hal ini sering menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah, khususnya ketika kebijakan moneter bersifat nasional dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan lokal masyarakat pedesaan.



Keterbatasan infrastruktur, akses informasi, serta ketergantungan pada sektor ekonomi yang rentan membuat wilayah perdesaan berada dalam posisi yang lebih lemah dalam menghadapi perubahan makroekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi spesifik wilayah untuk mengurangi kerentanan dan memperkuat daya tahan ekonomi lokal.

5. Teori Dualisme Ekonomi

Teori dualisme ekonomi yang diperkenalkan oleh Boeke dan Lewis menggambarkan adanya koeksistensi antara dua sektor ekonomi dalam negara berkembang, yaitu sektor modern (formal) dan sektor tradisional (informal). Masyarakat di wilayah perdesaan umumnya berada dalam sektor tradisional, yang cenderung tidak terjangkau oleh kebijakan ekonomi makro seperti kebijakan moneter. Oleh karena itu, pengaruh kebijakan tersebut terhadap masyarakat desa seringkali berbeda dibandingkan dengan wilayah yang lebih maju secara ekonomi.

6. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori pilihan rasional berakar dari ilmu ekonomi klasik melalui pemikiran Adam Smith dan berkembang secara formal oleh Neumann dan Morgenstern dalam konteks matematis. Selanjutnya, pendekatan ini diperluas ke berbagai bidang: Gary Becker dalam ilmu sosial, James Coleman dalam sosiologi, dan Anthony Downs dalam ilmu politik. Namun, pendekatan ini tidak luput dari kritik, salah satunya dari Herbert Simon, yang menekankan keterbatasan rasionalitas manusia. Pada intinya, teori ini berpandangan bahwa individu bertindak berdasarkan perhitungan logis untuk memaksimalkan tujuan atau kepentingan pribadinya.

7. Teori Ketimpangan Akses Keuangan (*Financial Inclusion Theory*)

World Bank (2014) menyatakan bahwa inklusi keuangan mencerminkan kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan formal seperti tabungan, kredit, dan asuransi. Di banyak wilayah perdesaan, rendahnya tingkat inklusi keuangan menjadi hambatan utama dalam menyalurkan dampak positif dari kebijakan moneter, karena sebagian besar penduduk belum memiliki hubungan yang memadai dengan institusi keuangan formal.

8. Teori Ketahanan Ekonomi Lokal

Ketahanan ekonomi lokal merujuk pada kapasitas suatu komunitas dalam menghadapi dan beradaptasi terhadap tekanan ekonomi dari luar, termasuk perubahan yang disebabkan oleh kebijakan nasional. Masyarakat desa yang memiliki sistem ekonomi lokal yang kuat seperti koperasi, pasar lokal, atau usaha mikro cenderung lebih resilien dan mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika ekonomi makro, termasuk perubahan yang dipicu oleh kebijakan moneter. Sejumlah pemikir telah memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk kerangka teoritik ketahanan ekonomi lokal dari berbagai sudut pandang: Mark Skidmore dikenal karena fokus penelitiannya pada hubungan antara kebijakan fiskal dan ketahanan ekonomi, khususnya dalam menghadapi bencana. Ia menekankan pentingnya strategi adaptif di tingkat lokal agar daerah mampu pulih dari tekanan ekonomi dan bencana alam secara efektif.

Sementara itu, Kathryn Foster memusatkan perhatiannya pada konsep resiliensi wilayah. Ia menyoroti bahwa kekuatan institusi lokal serta jaringan sosial yang terbangun di tingkat komunitas menjadi kunci dalam membentuk ketahanan ekonomi yang tangguh terhadap perubahan dan tantangan. Kontribusi penting juga datang dari Norris dan koleganya, yang mengembangkan kerangka kerja mengenai ketahanan komunitas. Meskipun tidak secara eksklusif membahas ketahanan ekonomi, kerangka ini sangat relevan karena menekankan peran kapasitas sosial, sumber daya lokal, dan hubungan antar-anggota masyarakat dalam membangun ketahanan secara kolektif.



Martin dan Sunley menyumbangkan perspektif tentang ketahanan ekonomi regional, dengan mengkaji bagaimana suatu wilayah merespons dan pulih dari guncangan ekonomi seperti krisis global. Mereka menggarisbawahi bahwa ketahanan tidak hanya dilihat dari kecepatan pemulihan, tetapi juga dari kemampuan daerah untuk tidak kembali pada struktur ekonomi yang rentan. Selanjutnya, Neil Adger memberikan kontribusi melalui pendekatan ketahanan sosial-ekologis. Ia menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari dinamika lingkungan dan sosial, terutama dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim.

Terakhir, Davoudi dan rekan-rekannya menekankan pentingnya integrasi prinsip-prinsip ketahanan dalam perencanaan wilayah dan kota. Mereka melihat ketahanan ekonomi lokal sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan, yang harus mampu merespons disrupsi dan perubahan secara sistematis.

9. Teori Pembangunan Berbasis Komunitas (*Community-Based Development*)

Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kaitannya dengan kebijakan moneter, pendekatan ini mendorong perlunya formulasi kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik sosial dan ekonomi lokal, agar lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat pedesaan. Salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pendekatan pembangunan berbasis komunitas adalah Robert Chambers, yang dikenal melalui konsep *Participatory Rural Appraisal (PRA)*. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat miskin dan kelompok marginal dalam proses pembangunan, menjadikan mereka bukan sebagai objek, melainkan subjek utama pembangunan.

Paulo Freire, seorang pemikir asal Brasil, turut memberikan kontribusi penting melalui gagasan pendidikan kritis dan *kesadaran kolektif*. Freire menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat hanya dapat terjadi melalui proses dialog yang setara, yang mendorong refleksi sosial dan tindakan transformatif dari dalam komunitas itu sendiri. Kontribusi lain datang dari Norman Uphoff, yang menggarisbawahi pentingnya lembaga lokal, baik formal maupun informal, dalam mendorong keberhasilan pembangunan. Ia percaya bahwa penguatan institusi lokal menjadi landasan utama untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif.

David Korten merupakan salah satu tokoh yang mengkritik pendekatan pembangunan top-down dan mempromosikan pembangunan yang berfokus pada masyarakat. Melalui pendekatan yang berorientasi pada rakyat, ia mendorong penguatan masyarakat sipil dan komunitas lokal sebagai agen utama perubahan sosial. Sementara itu, James Manor memberikan kontribusi melalui evaluasi terhadap berbagai program pembangunan partisipatif. Ia terlibat dalam kajian mengenai pendekatan *community-driven development (CDD)*, dan mendorong penerapannya dalam kebijakan publik secara lebih luas dan terukur.

Elinor Ostrom, peraih Nobel Ekonomi, memperlihatkan bagaimana komunitas lokal dapat mengelola sumber daya bersama secara mandiri dan efektif tanpa intervensi berlebihan dari negara atau pasar. Gagasannya memperkuat posisi tata kelola lokal sebagai elemen penting dalam menciptakan ketahanan dan kemandirian ekonomi komunitas. Terakhir, Bill Cooke dan Uma Kothari memberikan kritik terhadap praktik partisipasi dalam pembangunan yang seringkali hanya menjadi formalitas. Meskipun bersifat kritis, pandangan mereka tetap relevan karena mendorong pentingnya partisipasi yang benar-benar otentik dan mampu membawa transformasi nyata dalam kehidupan komunitas.

10. Teori Keadilan Sosial Ekonomi (*Social Justice Theory*)

John Rawls menegaskan bahwa kebijakan publik harus diarahkan untuk memberikan manfaat terbesar bagi kelompok yang paling lemah atau rentan dalam masyarakat. Dalam konteks kebijakan moneter, apabila dampaknya tidak memperhatikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan,



maka hal itu berisiko memperparah ketimpangan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis guna mengungkap makna dan pengalaman subjektif masyarakat pedesaan ya itu di salah satu desa bandar mariah di kabupaten simalungun terhadap dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan moneter. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yakni di daerah pedesaan bandar mariah yang di mana sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan usaha mikro.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap 12 informan yang terdiri dari beberapa orang petani, pelaku usaha kecil dan mikro, ibu rumah tangga, serta tokoh lokal. Wawancara disusun secara semi-terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka, yang dirancang untuk mengeksplorasi pandangan mereka mengenai dinamika ekonomi makro, seperti inflasi, perubahan suku bunga, dan harga barang kebutuhan pokok.

Proses analisis data menggunakan pendekatan tematik, dengan cara mengidentifikasi pola-pola umum dan tema utama dari hasil transkrip wawancara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai persepsi dan pengalaman masyarakat terhadap kebijakan moneter dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Hasil dan Pembahasan

Hasil studi ini mengungkap bahwa masyarakat di wilayah pedesaan yaitu desa bandar mariah kabupaten simalungun memiliki kesadaran yang cukup tinggi terhadap dampak langsung kebijakan moneter dalam kehidupan sehari-hari mereka, meskipun sebagian besar tidak memiliki pemahaman yang mendalam mengenai terminologi dan konsep ekonomi makro secara teknis. Temuan utama dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek penting berikut:

1. Kenaikan Harga Barang Kebutuhan Pokok

Sebagian besar informan menyampaikan bahwa ketika inflasi terjadi, harga barang-barang esensial seperti beras, minyak goreng, dan bahan bakar mengalami lonjakan yang signifikan. Peningkatan harga ini dirasakan sangat membebani anggaran rumah tangga, sehingga memaksa masyarakat untuk mengurangi konsumsi dan berdampak pada penurunan kualitas hidup.

2. Hambatan dalam Mengakses Kredit Produktif

Kenaikan suku bunga sebagai implikasi dari kebijakan moneter menyebabkan biaya pinjaman di lembaga keuangan, baik koperasi maupun bank, menjadi lebih mahal. Akibatnya, para pelaku usaha kecil dan petani cenderung menghindari pengajuan pinjaman karena dinilai berisiko, sehingga mereka menunda atau bahkan menghentikan aktivitas produksi dan usaha.

3. Ketergantungan pada Penghasilan Tidak Tetap

Dalam situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian, masyarakat cenderung bergantung pada pendapatan musiman atau pekerjaan informal yang tidak menjamin stabilitas penghasilan. Kondisi ini memperkuat rasa tidak aman secara ekonomi, serta meningkatkan kerentanan terhadap gejolak makroekonomi.

4. Strategi Bertahan dan Penyesuaian Sosial

Sebagai bentuk respons terhadap kondisi ekonomi yang memburuk, masyarakat mengadopsi berbagai strategi adaptif, seperti mengurangi pengeluaran rumah tangga, mencari sumber penghasilan tambahan, serta mengandalkan dukungan



sosial dari lingkungan sekitar melalui praktik gotong royong, barter, atau jaringan komunitas.

Secara keseluruhan, masyarakat perdesaan benar-benar merasakan dampak dari kebijakan moneter, terutama dalam bentuk menurunnya daya beli dan berkurangnya kesejahteraan ekonomi. Meski demikian, sebagian besar dari mereka tidak sepenuhnya menyadari bahwa kondisi ini merupakan konsekuensi dari kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter memberikan pengaruh yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan, terutama dalam aspek daya beli, akses terhadap sumber pembiayaan, serta kestabilan ekonomi rumah tangga. Walaupun pemahaman masyarakat terhadap konsep dan mekanisme kebijakan moneter masih terbatas, mereka tetap merasakan dampaknya secara langsung melalui perubahan kondisi ekonomi yang terjadi.

Dengan demikian, sangat penting bagi para pembuat kebijakan untuk lebih memperhatikan suara dan kebutuhan masyarakat desa dalam proses perumusan kebijakan moneter yang lebih inklusif dan kontekstual. Pendekatan yang melibatkan partisipasi masyarakat serta peningkatan literasi ekonomi lokal menjadi langkah strategis dalam mengurangi kesenjangan pemahaman dan sekaligus memperluas dampak positif kebijakan ekonomi makro di tingkat akar rumput.

Daftar Pustaka

- Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: Are they related? *Progress in Human Geography*, 24(3), 347–364. <https://doi.org/10.1191/030913200701540465>
- Chambers, R. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. London: Longman.
- Cooke, B., & Kothari, U. (Eds.). (2001). *Participation: The New Tyranny?* London: Zed Books.
- Davoudi, S., Shaw, K., Haider, L. J., Quinlan, A. E., Peterson, G. D., Wilkinson, C., ... & Davoudi, S. (2012). Resilience: A Bridging Concept or a Dead End? *Planning Theory & Practice*, 13(2), 299–333. <https://doi.org/10.1080/14649357.2012.677124>
- Foster, K. A. (2007). A case study approach to understanding regional resilience. *Berkeley Planning Journal*, 19(1), 1–23.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Friedmann, J. (1966). *Regional Development Policy: A Case Study of Venezuela*. Cambridge: MIT Press.
- Korten, D. C. (1990). *Getting to the 21st Century: Voluntary Action and the Global Agenda*. West Hartford: Kumarian Press.
- Manor, J. (2006). Decentralization and sustainable livelihoods. In C. R. Pretty, N. Guijt, I. Scoones & J. Thompson (Eds.), *Participatory Learning and Action* (pp. 109–122). London: IIED.
- Martin, R., & Sunley, P. (2015). On the notion of regional economic resilience: conceptualization and explanation. *Journal of Economic Geography*, 15(1), 1–42. <https://doi.org/10.1093/jeg/Ibu015>
- Mishkin, F. S. (2007). *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets* (8th ed.). Boston: Pearson/Addison Wesley.
- Nopirin. (2016). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Norris, F. H., Stevens, S. P., Pfefferbaum, B., Wyche, K. F., & Pfefferbaum, R. L. (2008). Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities, and Strategy for Disaster Readiness.



American Journal of Community Psychology, 41, 127–150. <https://doi.org/10.1007/s10464-007-9156-6>

Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: Harvard University Press.

Skidmore, M. (2001). Risk, natural disasters, and household saving in a life cycle model. *Japan and the World Economy*, 13(1), 15–34. [https://doi.org/10.1016/S0922-1425\(00\)00047-9](https://doi.org/10.1016/S0922-1425(00)00047-9)

Smith, A. (1776). *The Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell.

Sukirno, S. (2017). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Boston: Pearson Education.

Uphoff, N. (1992). *Learning from Gal Oya: Possibilities for Participatory Development and Post-Newtonian Social Science*. Ithaca: Cornell University Press.

World Bank. (2014). *Global Financial Development Report 2014: Financial Inclusion*. Washington, DC: World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9985-9>